



DOMESTIC UPDATE

Strategi Pemerintah Menjaga Daya Beli Lewat Enam Insentif Ekonomi Jelang Libur Sekolah

Pemerintah Indonesia merancang enam paket insentif ekonomi yang akan mulai berlaku pada Juni 2025 guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Dalam paket tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa subsidi upah (BSU) akan kembali diberikan sebesar Rp150.000 per bulan selama dua bulan kepada pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, mirip dengan skema bantuan saat pandemi meskipun nominalnya lebih kecil. Paket insentif lainnya meliputi diskon tiket pesawat, tarif tol, dan tarif listrik, serta penebalan bantuan sosial dan subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Regulasi teknis tengah disiapkan oleh masing-masing kementerian untuk memastikan implementasi yang tepat sasaran, terutama dalam rangka mendorong konsumsi domestik pada periode libur sekolah Juni-Juli 2025. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran psikologis 5%, mengingat konsumsi rumah tangga masih menjadi pilar utama perekonomian nasional.

BI Naikkan Rasio Pendanaan Luar Negeri untuk Perluas Sumber Kredit Perbankan

Bank Indonesia (BI) resmi menaikkan batas Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) perbankan dari 30 persen menjadi 35 persen mulai 1 Juni 2025, sebagai strategi makroprudensial untuk memperluas sumber likuiditas bank dalam menyalurkan kredit di tengah ketatnya persaingan Dana Pihak Ketiga (DPK). Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memberikan ruang tambahan bagi bank, khususnya yang tidak mampu bersaing dalam menawarkan suku bunga DPK special rate, agar tetap memiliki akses pendanaan alternatif melalui pinjaman luar negeri. Meskipun dampak terhadap perekonomian diperkirakan baru akan terlihat dalam jangka menengah (1-2 tahun), dalam jangka pendek kebijakan ini langsung memperkuat kapasitas pembiayaan bank, sekaligus menambah fleksibilitas sektor perbankan dalam mendukung pertumbuhan kredit domestik.

Indonesia Butuh Rp565,3 T untuk Bangun Transmisi Listrik 47.758 kms

Pemerintah telah menargetkan dalam 10 tahun ke depan akan membangun jaringan transmisi listrik dengan panjang 47.758 kilometer sirkuit (kms). Pembangunan tersebut telah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN 2025-2034. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pembangunan transmisi harus dibangun oleh tenaga dalam negeri dan membutuhkan investasi khusus dengan nilai mencapai Rp565,3 T sampai dengan tahun 2034. Lebih rinci dijelaskan bahwa pembangunan transmisi 47.758 kms terdiri atas beberapa regional, dengan tambahan transmisi paling panjang berada di wilayah Jawa, Madura, Bali yaitu sebesar 13.900 kms. Kemudian disusul oleh Sumatera sepanjang 11.200 kms, Kalimantan 9.800 kms, Sulawesi 9.000 kms, dan Maluku, Papua, Nusa Tenggara 3.900 kms. Di samping itu di dalam RUPTL, Pemerintah juga akan menambah pembangkit listrik hingga 69,5 gigawatt (GW) dengan 76% dari total kapasitas tersebut berasal dari EBT.

Government Strategy to Maintain Purchasing Power Through Six Economic Incentives Ahead of School Holidays

The Indonesian government has designed six economic incentive packages that will come into effect in June 2025 to maintain people's purchasing power and encourage domestic economic growth amid global uncertainty. In the package, Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto revealed that wage subsidies (BSU) will again be provided at IDR150,000 per month for two months to workers with salaries below IDR3.5 million, similar to the assistance scheme during the pandemic although the nominal amount is smaller. Other incentive packages include discounts on airline tickets, toll rates, and electricity rates, as well as thickening social assistance and subsidies for Work Accident Insurance (JKK) contributions. Technical regulations are being prepared by each ministry to ensure targeted implementation, especially in order to encourage domestic consumption during the June-July 2025 school holidays. The government hopes that this policy will be able to maintain economic growth in the psychological range of 5%, considering that household consumption is still the main pillar of the national economy.

BI Increases Foreign Funding Ratio to Expand Bank Credit Sources

Bank Indonesia (BI) has officially increased the Foreign Funding Ratio (RPLN) limit for banks from 30 percent to 35 percent starting June 1, 2025, as a macroprudential strategy to expand bank liquidity sources in distributing credit amidst tight competition for Third Party Funds (DPK). Head of the BI Macroprudential Policy Department, Solikin M. Juhro, explained that this policy aims to provide additional space for banks, especially those unable to compete in offering special DPK interest rates, so that they still have access to alternative funding through foreign loans. Although the impact on the economy is expected to only be seen in the medium term (1-2 years), in the short term this policy directly strengthens bank financing capacity, while increasing the flexibility of the banking sector in supporting domestic credit growth.

Indonesia Needs Rp565.3 T to Build 47,758 kms of Electricity Transmission

The government has targeted to build an electricity transmission network with a length of 47,758 circuit kilometers (kms) in the next 10 years. The development has been stated in the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) of PT PLN 2025-2034. The Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM), Bahlil Lahadalia, said that transmission construction must be built by domestic forces and requires special investment with a value of Rp565.3 T until 2034. In more detail, it was explained that the 47,758 kms transmission development consisted of several regions, with the longest additional transmission being in the Java, Madura, Bali region, which amounted to 13,900 kms. Then followed by Sumatra along 11,200 kms, Kalimantan 9,800 kms, Sulawesi 9,000 kms, and Maluku, Papua, Nusa Tenggara 3,900 kms. In addition, in the RUPTL, the government will also add power plants up to 69.5 gigawatts (GW). 76% of the total capacity comes from renewable energy.

EXCHANGE RATE

	31 Desember 2024	26 Mei 2025	d-t-d (%)	m-t-d (%)	y-t-d (%)
Indonesia	16.132,00	16.249,00	-0,19	2,13	-0,73
Tiongkok	7,30	7,19	-0,08	1,17	1,55
Filipina	57,98	55,42	-0,27	0,78	4,41
India	85,61	85,09	0,15	-0,71	0,61
Korea Selatan	1.478,60	1.370,38	-0,36	3,83	7,32
Jepang	157,24	142,76	0,06	0,20	9,21
Thailand	34,28	32,61	0,00	2,40	4,87
Malaysia	4,47	4,22	0,30	2,25	5,66
Singapura	1,37	1,28	0,01	1,69	6,00
EU	0,97	0,88	-0,01	0,53	9,05

STOCK PRICE INDEX

	26 May 2025	Dtd (%)	Rank	Mtd (%)	Rank	Ytd (%)	Rank
Indonesia (JCI)	7.188,35	-0,36	8	6,23	1	1,53	5
Filipina (PSEi)	6.389,94	-0,36	9	0,55	9	-2,13	7
Malaysia (FTSE BM)	1.534,30	-0,07	5	-0,38	10	-6,58	10
Singapura (STI)	3.875,60	-0,18	6	1,36	8	2,32	4
Thailand (SET 50)	1.178,43	0,18	3	-1,57	11	-15,84	11
Hong Kong (HSI)	23.282,33	-1,35	11	5,26	2	16,06	1
Jepang (Nikkei 225)	37.531,53	1,00	2	4,12	3	-5,92	9
Korea (Kospi)	2.644,40	2,02	1	3,43	4	10,21	2
Tiongkok (SH Comp.)	3.346,84	-0,05	4	2,07	7	-0,15	6
Amerika Serikat (DJIA)	41.603,07	-0,61	10	2,65	6	-2,21	8
Inggris (FTSE 100)	8.718,00	-0,24	7	2,96	5	6,67	3

COMMODITY PRICE

	Actual	Unit	Actual	Unit.Conv	Daily	Monthly	Yearly	Date
Crude Oil	61,52	USD/Bbl			-0,02%	-0,86%	-21,73%	May/26
Brent	64,75	USD/Bbl			-0,05%	-0,40%	-22,11%	May/26
Natural gas	3,27	USD/MMBtu			-1,83%	-2,33%	30,49%	May/26
Gasoline	2,11	USD/Gal			0,10%	0,14%	-15,92%	May/26
Coal	100,40	USD/T			0,30%	5,96%	-29,94%	May/23
Gold	3.345,79	USD/t.oz			-0,36%	0,11%	42,04%	May/26
Nickel	15.570,00	USD/T			0,00%	-0,73%	-23,93%	May/26
Palm Oil	3.829,00	MYR/T			0,05%	-3,33%	-1,11%	May/26
Rice	13,14	USD/cwt	289,69	USD/T	-0,26%	5,00%	-28,46%	May/26
Soybeans	10,60	USD/Bu	389,48	USD/T	-0,03%	0,75%	-15,21%	May/26
Corn	4,59	USD/Bu	180,70	USD/T	-0,05%	-3,41%	-1,45%	May/26
Wheat	5,44	USD/Bu	199,89	USD/T	0,24%	5,49%	-23,95%	May/26
Sugar	17,31	Cts/pound	346,20	USD/T	0,00%	-2,96%	-7,47%	May/26
Coffee	359,84	Cts/pound	7.196,80	USD/T	0,02%	-13,27%	56,78%	May/26
Cocoa	9.864,94	USD/T			0,50%	9,21%	14,58%	May/26
Beef	301,00	BRL/15KG			-0,87%	-7,14%	35,56%	May/23
Rubber	1,69	USD/kg			-0,18%	0,36%	-3,20%	May/26



Source : Bloomberg, Bursa Efek Indonesia, Tradingeconomics, Agricultural Conversion Calculator





GLOBAL UPDATE

ASIA PACIFIC

Defisit Perdagangan Thailand Melebar Tajam Akibat Lonjakan Impor

Thailand mencatat defisit perdagangan sebesar USD 3,3 miliar pada April 2025, hampir dua kali lipat dari defisit USD 1,64 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya dan jauh melampaui ekspektasi pasar sebesar USD 1,2 miliar. Ini merupakan defisit pertama dalam tiga bulan terakhir, dipicu oleh pertumbuhan impor yang melesat dibandingkan ekspor. Ekspor naik 10,2% secara tahunan menjadi USD 25,6 miliar—menandai ekspansi bulanan ke-10 berturut-turut dan melebihi proyeksi pasar—namun masih melambat dibandingkan lonjakan 17,8% pada Maret. Kinerja ekspor ini sebagian didorong oleh percepatan pengiriman barang menyusul pengumuman Presiden Trump tentang jeda 90 hari atas rencana tarif 36% untuk produk Thailand. Di sisi lain, impor melonjak 16,1% menjadi rekor USD 28,95 miliar, mencerminkan akselerasi permintaan domestik dan investasi serta melampaui ekspektasi kenaikan 7%. Akumulasi selama empat bulan pertama 2025 menunjukkan defisit perdagangan sebesar USD 2,2 miliar, dengan ekspor dan impor masing-masing tumbuh 14,0% dan 9,6%, menandakan ketidakseimbangan eksternal yang semakin mencolok dalam neraca dagang Thailand.

Thailand Trade Deficit Widens Sharply on Import Surge

Thailand posted a trade deficit of US\$3.3 billion in April 2025, nearly doubling the US\$1.64 billion deficit in the same period a year earlier and far surpassing market expectations of US\$1.2 billion. It was the first deficit in three months, driven by faster growth in imports than exports. Exports rose 10.2% year-on-year to US\$25.6 billion—marking the 10th straight monthly expansion and beating market projections—but were still slowing from a 17.8% surge in March. The export performance was driven in part by accelerated shipments of goods following President Trump's announcement of a 90-day pause on planned 36% tariffs on Thai goods. Imports, on the other hand, jumped 16.1% to a record US\$28.95 billion, reflecting accelerated domestic demand and investment and beating expectations for a 7% increase. The accumulation for the first four months of 2025 showed a trade deficit of USD 2.2 billion, with exports and imports growing 14.0% and 9.6% respectively, indicating a widening external imbalance in Thailand's trade balance.

UNITED STATES

Ketidakpastian Kebijakan Trump Tekan Dolar AS ke Titik Terendah dalam Sebulan

Dolar Amerika Serikat melemah tajam hingga ke level terendah dalam satu bulan, dengan indeks dolar turun di bawah angka 99 pada Senin, dipicu oleh penguatan euro setelah Presiden Donald Trump menunda penerapan tarif 50% terhadap Uni Eropa hingga 9 Juli. Keputusan ini diumumkan melalui Truth Social pasca percakapan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, yang menyebut perlunya waktu tambahan untuk mencapai kesepakatan yang baik. Ketidakpastian pasar semakin meningkat setelah Trump mengancam akan mengenakan tarif 25% terhadap iPhone yang tidak diproduksi di dalam negeri, menimbulkan kekhawatiran atas eskalasi tensi dagang yang lebih luas. Di tengah dinamika tersebut, kepercayaan investor terhadap aset AS tertekan oleh perubahan sikap kebijakan dagang Trump yang sulit diprediksi, serta ketidakpastian fiskal menyusul sinyal bahwa proposal belanja dan pemotongan pajak besar-besaran dari Trump kemungkinan akan mengalami revisi signifikan di Senat.

Trump Policy Uncertainty Pushes US Dollar to One-Month Low

The US dollar weakened sharply to its lowest level in one month, with the dollar index falling below 99 on Monday, driven by a stronger euro after President Donald Trump delayed the imposition of 50% tariffs on the European Union until July 9. The decision was announced via Truth Social after a conversation with European Commission President Ursula von der Leyen, who said more time was needed to reach a good deal. Market uncertainty was further heightened after Trump threatened to impose 25% tariffs on iPhones not manufactured domestically, raising concerns about a broader escalation in trade tensions. Amid the dynamics, investor confidence in US assets was weighed down by Trump's unpredictable shift in trade policy, as well as fiscal uncertainty following signs that Trump's massive spending and tax cut proposals are likely to face significant revisions in the Senate.

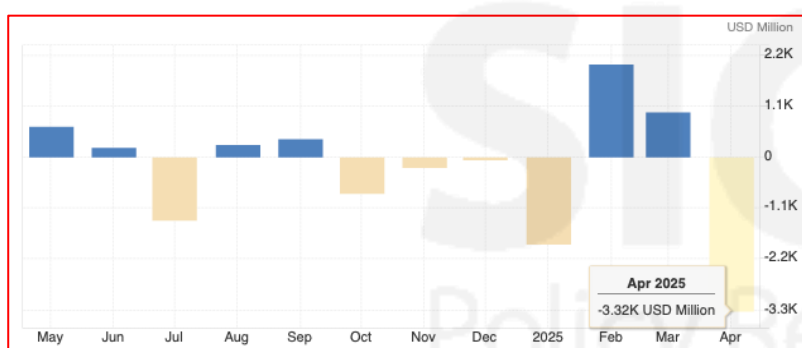
EURO ZONE

Penundaan Tarif Impor oleh Trump, Imbal Hasil Obligasi Jerman 10-Y Mendekati 2,6%

Imbal hasil obligasi Jerman dengan tenor 10 tahun mendekati level 2,6% karena investor menyambut baik keputusan Presiden Trump untuk menunda tarif 50% yang direncanakan untuk impor dari Uni Eropa. Pada hari Jumat (23/05), Trump telah menyatakan bahwa pembicaraan perdagangan dengan UE "tidak menghasilkan apa-apa" dan mengusulkan untuk mengenakan tarif tinggi mulai 1 Juni. Namun, setelah panggilan telepon dengan Presiden European Commission Ursula von der Leyen, Trump mengumumkan perpanjangan negosiasi perdagangan hingga 9 Juli. Di bawah kerangka tarif resiprokal yang diluncurkan pada bulan April, UE menghadapi pungutan 20%, yang untuk sementara dikurangi menjadi 10% hingga batas waktu baru. Di sisi kebijakan moneter, ECB secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga pada pertemuannya di bulan Juni.

Trump Delays Import Tariffs, 10-Y German Bond Yields Near 2.6%

German 10-year bond yields approached the 2.6% level as investors welcomed President Trump's decision to postpone the planned 50% tariffs on imports from the European Union. On Friday (23/05), Trump had stated that trade talks with the EU were "going nowhere" and proposed to impose high tariffs from June 1. However, after a phone call with European Commission President Ursula von der Leyen, Trump announced an extension of trade negotiations until July 9. Under the reciprocal tariff framework launched in April, the EU faces a 20% levy, which was temporarily reduced to 10% until the new deadline. On the monetary policy front, the ECB is widely expected to cut interest rates at its meeting in June 2025.

Thailand Balance of Trade (USD Million)**United States Dollar****Germany 10-Year Bond Yield (%)**